

INVESTOR ASET KRIPTO
TEMBUS 17 JUTA LEBIH

PASAR LELANG KOMODITI TERUS
MENGGEJAT DI DAERAH

Buletin

Bappebti

Mengabdikan dengan Integritas



**MENCARI YANG
TERBAIK PPH
TRANSAKSI PBK**

EDISI 247

JUNI 2023



Kedelai



Garam



Kakao



Gabah



Gambir



Bawang Merah

20 KOMODITI SRG



Gula Kristal Putih



Rotan



Karet



Rumput Laut



Lada



Beras



Jagung



Kopi



Teh



Kopra



Timah



Ikan



Pala



Ayam Karkas

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

www.bappebti.go.id

Dari Redaksi



Pembaca **Buletin Bappebti** yang budiman, Pajak merupakan bagian penting pendapatan negara untuk membiayai berbagai kegiatan untuk kepentingan rakyat. Seperti kita ketahui berbagai kegiatan dikenai pajak oleh negara, termasuk aktivitas jual-beli dalam bursa berjangka komoditi. Pemerintah telah menetapkan pajak berupa PPh final sebesar 2,5 persen dari transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Namun angka tersebut dinilai banyak pihak terlalu besar, cukup berat dan tidak mendorong pertumbuhan perdagangan berjangka. Problematika ini kami angkat dalam bahasan Berita Utama pada edisi kali ini.

Pada rubrik wawancara khusus kami hadirkan perbincangan yang sangat menarik dengan Alit Pirmansah, dari ICC (*International Coconut Community*), untuk menggali banyak hal terkait komoditi kelapa, komoditi yang bisa diperoleh di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pada rubrik Profil Komoditi kami informasikan tentang Kayu Manis yang sebentar lagi menjadi salah satu jenis komoditi Sistem Resi Gudang.

Sementara itu Pasar Lelang Komoditas tetap berjalan di berbagai daerah, di antaranya di Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Pada rubrik Berjangka diinformasikan jumlah investor kripto tembus 17 juta orang lebih. Di sisi lain Bappebti telah mengeluarkan izin untuk 501 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia (rubrik Regulasi).

Seperti biasa, tim redaksi juga menyampaikan kegiatan yang dilakukan Bappebti sepanjang bulan ini. Jangan lupa pula menyimak *English Corner* yang selalu hadir setiap kali penerbitan. Juga Resensi Buku yang kali ini mengetengahkan buku tentang perdagangan valas.

Pembaca yang budiman, silakan simak informasi menarik lainnya yang kami sajikan pada setiap edisi terbitan kami. Kami berharap kehadiran **Buletin Bappebti** selalu memberi manfaat bagi Anda. Selanjutnya Anda yang ingin memberi masukan kepada Redaksi **Buletin Bappebti** silakan hubungi kami melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak 0811-1109-901, (021) 2301665/63/54/45

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Olvy Andrianita, **Redaktur:** Sentot Kamaruddin, **Penyunting/Editor:** Muflihah Widiyani, Aryo Guritno, Aprilianto, **Fotografer:** Mutia Endang Novianti, Gita Regina Napitupulu, **Sekretaris:** Renatha Savira, **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

f Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti

SMS Center BAPPEBTI
0811-1109-901

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

DAFTAR ISI

BERITA UTAMA



4



WAWANCARA

24



PROFIL KOMODITI

28

PASAR BERJANGKA	10
PASAR LELANG	12
AGENDA FOTO	14
AKTUALITA	18
ENGLISH CORNER	22
RESENSI	29
REGULASI	30

Mencari Yang Terbaik PPH Transaksi PBK

Pajak merupakan instrumen yang sangat penting untuk pendapatan dan pemasukan negara. Melalui pajak negara bisa membiayai berbagai proyek dan kegiatan lainnya, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Pembangunan jalan raya, bandara, dan berbagai fasilitas lainnya banyak yang dibiayai dari hasil pemasukan pajak. Pajak menasar berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang terjadi di bursa berjangka komoditi. Pemerintah memberlakukan pajak dan menetapkan nilainya sebesar 2,5 persen. Namun ketetapan pajak itu dinilai agak berat, sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan berikutnya untuk memperbaikinya. Proses perbaikan itu hingga kini masih terus berjalan.

Lantai bursa berjangka komoditi sebagaimana juga bursa saham terlihat sangat aktif bergerak. Jajaran layar monitor memperlihatkan grafik-grafik yang terus bergerak. Ada yang bergerak ke atas yang berarti harganya naik, ada juga yang bergerak ke bawah yang memperlihatkan turunnya harga komoditi yang ditransaksikan.

Pergerakan grafik itu juga bisa menggambarkan suasana hati para investor. Ada yang senang karena memperoleh untung dan ada yang harus termenung karena merugi. Tapi begitulah suasana perdagangan. Bagi yang sudah terbiasa melakukan transaksi berjangka, naik turun harga komoditi merupakan hal yang biasa. Begitu juga dengan untung ataupun rugi, karena hal itu bagian dari manfaat yang bisa diperoleh ataupun risiko yang mesti ditanggung ketika melakukan transaksi jual-beli dalam perdagangan berjangka.

Namun yang pasti, setiap transaksi perdagangan berjangka yang terjadi akan dikenakan pajak. Pemerintah melalui Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, telah mengatur besaran pajak dalam perdagangan berjangka. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2009 ditetapkan pajak penghasilan (PPH) atas kontrak berjangka sebesar 2,5 persen dari margin.

Ada 5 pasal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa, yaitu:

Pasal 1:

Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2:

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

Pasal 3:

- (1) Lembaga kliring dan penjamin wajib memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat menerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangka atau anggota bursa.
- (2) Lembaga kliring dan penjamin wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pos atau, bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Lembaga kliring dan penjamin wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 4:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Jelas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 bahwa besarnya pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan adalah 2,5 persen. Namun banyak pelaku perdagangan dan bursa berjangka yang keberatan karena angka tersebut dinilai terlalu tinggi dan kurang kondusif bagi pertumbuhan perdagangan berjangka.





Stephanus Paulus Lumintang

Direktur Utama JFX

Dalam beberapa kesempatan Direktur Utama Jakarta Future Exchange (JFX) **Stephanus Paulus Lumintang** menyampaikan pajak yang saat ini dikenakan terhadap investor cukup memberatkan. Karena itu JFX mengusulkan nilai PPh Final untuk transaksi multilateral dan bilateral di bursa berjangka sebesar 0,1 persen. Ia memberi perbandingan pemungutan PPh final di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang besarnya hanya 0,1 persen. *"PPh yang sekarang memberatkan investor. Kita sendiri sudah mengusulkan nilai PPh final nantinya sebesar 0,1 persen untuk transaksi multilateral dan bilateral,"* ujar Stephanus. Jumlah yang diusulkan oleh Stephanus untuk perdagangan berjangka ini sama dengan perdagangan saham di bursa efek.

Stephanus menambahkan terdapat perbedaan antara regulasi PPh lama dan yang baru, selain besaran nilainya juga terkait pengenaan pajaknya. Pada PPh yang sebelumnya berlaku, investor akan dikenakan pajak PPh setelah melakukan likuidasi yang menguntungkan, sedangkan bila mengalami kerugian tidak dibebani pajak. Sementara pada PPh final dikenakan atas initial margin, yaitu dana yang harus ditanamkan investor untuk bertransaksi di bursa berjangka. Dengan demikian investor akan dikenakan pajak setelah melakukan transaksi, apakah transaksinya itu akan profit/untung ataupun loss/rugi.

Secara regulasi, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dapat dikenakan pajak bersifat final dan pengaturannya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah.

Khusus untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa sebenarnya pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP nomor 17 Tahun 2009, namun peraturan tersebut telah dicabut dengan PP nomor 31 Tahun 2011 sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung nomor PUT-22P/HUM/2009. Oleh karena itu, saat ini untuk penghasilan yang diperoleh dari transaksi kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa dikenakan pajak penghasilan dengan mengikuti mekanisme umum. Mekanisme ini memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama terkait pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan/atau membayar Pajak Penghasilan yang terutang yang bersumber dari penghasilan transaksi kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa karena pemerintah secara otomatis hanya mengandalkan kesukarelaan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan tersebut. Saat ini PPh atas transaksi derivatif ada di ranah investor yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajaknya masing-masing.

Selain pengenaan pajak sebesar 0,1 persen, Stephanus juga berpendapat bila ingin memacu transaksi PBK idealnya pengenaan PPh sebaiknya ditiadakan terlebih dahulu, alias nol persen. Setelah volumenya meningkat signifikan, maka dalam 2-3 tahun ke depan baru investor diwajibkan membayar pajak. Usulan ini mengacu pada bursa berjangka di Singapura dan Malaysia yang memberlakukan pajak 0 (nol) persen. Karena pemberlakuan insentif seperti itu maka banyak investor mancanegara, termasuk juga dari Indonesia, yang berinvestasi di kedua negara tetangga tersebut. *"Setahu saya di Singapura dan Malaysia bursa*

berjangkanya tidak kena pajak, makanya transaksi di sana ramai. Bahkan di Malaysia investor terbesarnya justru berasal dari Indonesia," ujar Stephanus.

Menurutnya, kondisi investasi di Malaysia dan Singapura merupakan komparasi yang ideal dengan Indonesia karena cenderung serupa. Artinya, para pemangku kepentingan di Indonesia bisa melakukan perbandingan dari kedua negara tetangga tersebut dalam membuat sebuah peraturan. *"Kita perlu mencontoh negara-negara lain tersebut untuk meningkatkan transaksi derivatif di negara kita,"* katanya.

Lebih jauh Stephanus mengungkapkan pengenaan PPh final sangat dibutuhkan untuk pengembangan transaksi PBK di Indonesia. Hal itu akan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Mengingat banyaknya ragam komoditi dan besarnya potensi yang ada, PPh final diharapkan akan menaikkan transaksi PBK sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, PPh final ini pun dinilai berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sementara **Nursalam**, Direktur Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), menyatakan pengaturan PPh atas transaksi perdagangan berjangka komoditi tentu menjadi bagian penting dalam upaya memberikan stimulus transaksi. *"Diluar besaran pajak yang akan dikenakan, justru yang lebih penting adalah mengenai kondisi pengenaan. Dengan PPh final, investor akan dikenakan PPh setelah melakukan transaksi baik itu menjual maupun membeli,"* ujarnya. Ditambahkan bahwa ICDX menyambut baik dengan besaran 0,1 % seperti yang berlaku di Bursa Efek, dengan perhitungan 0,05% saat masuk pasar (*open position*), dan 0,05% pada saat keluar pasar (*close position*). Adapun dasar pengenaan pajaknya adalah 1 % dari nilai transaksi atau National Value. *"Dengan pemberlakuan PPh final ini, ekosistem perdagangan berjangka komoditi akan meningkat. PPh final ini akan menjadi stimulus luar biasa bagi perkembangan industri perdagangan*



Nursalam

Direktur ICDX

berjangka komoditi di Indonesia," kata Nursalam.

Para pemangku kepentingan di sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) telah melakukan langkah strategis dengan mengajukan usulan kepada pemerintah terkait PPh final ini. Pembahasan dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan melibatkan Bappebti, bursa perdagangan berjangka, lembaga kliring berjangka, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Namun kepastian soal besarnya pengenaan pajak PPh untuk perdagangan berjangka masih belum memperoleh kepastian. Para pemangku kepentingan PBK berharap usulan mereka tentang PPh final dengan besaran 0,1 persen dari setiap transaksi baik bilateral maupun multilateral bisa terakbul sehingga bisa memberi semangat baru dalam membentuk ekosistem perdagangan berjangka komoditi yang lebih kompetitif dan makin menarik bagi para investor.

Pasar Berjangka Yang Makin Tumbuh dan Menarik Banyak Kalangan



Transaksi perdagangan berjangka di Indonesia menunjukkan semangat yang makin bergairah. Ini ditunjukkan oleh angka perolehan perdagangan dari dua bursa berjangka yang ada, yaitu Jakarta Futures Exchange (JFX) dan ICDX (Indonesia Commodities and Derivatives Exchange).

Transaksi di Jakarta Futures Exchange (JFX) pada bulan Desember 2022 mencapai 2,2 juta lot sehingga sepanjang tahun 2022 JFX berhasil mencapai transaksi perdagangan sebanyak 16,3 juta lot. Jumlah ini jauh melampaui target perdagangan yang ditetapkan sebelumnya sebesar 12,6 juta lot atau naik 29 persen lebih. Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang, menjelaskan volume transaksi 16,3 juta lot tersebut terdiri dari multilateral dan PALN sebesar 9.220.548 lot dan bilateral sebesar 7.157.887 lot.

Menurut Stephanus kontrak yang menjadi primadona selama tahun 2022 adalah kontrak emas. Emas masih menjadi favorit bagi para investor untuk investasi, karena emas memiliki volatilitas harga yang tinggi dan juga merupakan instrumen investasi yang aman. Selain emas, kontrak olein juga semakin diminati, khususnya kontrak olein 100kg (OLE01) yang diluncurkan bersama dengan kontrak emas 10gr (GOL10) pada 30 September 2022 lalu.

Kontrak GOL10 dan OLE01 menjadi primadona pada penghujung tahun 2022 sejak diluncurkan. Untuk menggairahkan kedua kontrak ini, JFX bersama KBI mengadakan *trading competition* dan memberikan *holiday fee* sampai batas waktu 30 November 2022. Antusiasme para anggota bursa dalam berpartisipasi dan terus menarik investor untuk berperan aktif semakin

nyata dalam mendukung kedua kontrak ini sehingga bisa berkontribusi pada pencapaian volume di tahun 2022.

Stephanus mengungkapkan kinerja volume dan juga kontrak tersebut tidak lepas dari peran anggota JFX, pialang dan pedagang serta dukungan dari Bappebti dan para pelaku pasar yang semakin aktif berinvestasi di perdagangan berjangka. Sementara kinerja pasar fisik di JFX juga menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2022, khususnya pasar fisik emas *digital off exchange*, yang mencapai volume transaksi 1.107.191 gram di mana kinerja ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 1 juta gram. Untuk pasar fisik timah sendiri mencapai 48.330 ton yang terbagi atas timah ekspor sebesar 45.895 ton dan timah lokal sebesar 2.435 ton.

JFX yakin terhadap kinerja pasar fisik di tahun 2023 akan terus meningkat. Diharapkan juga dengan perdagangan pasar fisik yang dilakukan melalui bursa akan membantu pemerintah melalui Bappebti untuk mendapatkan data yang akurat baik dari sisi volume dan harga untuk membentuk informasi yang transparan kepada publik.

Sama seperti JFX, Bursa Komoditi ICDX juga menunjukkan gairah perdagangan berjangka semakin meningkat. ICDX mencatatkan total volume transaksi perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mencapai hingga 4,8 juta lot hingga minggu pertama Desember 2022. Sedangkan nilai transaksi yang tercatat mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Total transaksi ini meningkat jika dibandingkan dengan total transaksi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBK banyak diminati masyarakat di tengah banyaknya peristiwa ekonomi dan politik global di sepanjang tahun 2022.



ICDX mencatat produk yang menjadi penyumbang terbesar transaksi PBK adalah kontrak emas dengan total volume transaksi mencapai 571.416 Lot *settled*, atau lebih dari setengah total volume transaksi semua produk multilateral yang diperdagangkan di ICDX yakni emas, timah, valuta asing (Forex), dan minyak mentah. Pada periode yang sama, total volume transaksi multilateral ICDX mencapai 877.891 Lot *settled*. Hal ini juga didorong oleh peluncuran lebih dari 20 kontrak mata uang asing (forex) baru.

Sejumlah pencapaian ICDX lainnya di tahun 2022 adalah dengan hadirnya produk baru untuk transaksi Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN). Hal ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi kontrak di bursa asing, namun tidak memiliki akses ke bursa luar negeri. Melalui PALN di Bursa Komoditi ICDX, transaksi nasabah untuk kontrak milik bursa luar negeri akan lebih terjaga keamanannya karena tercatat dalam bursa.



Megain Widjaja

Board Member ICDX

Selanjutnya memasuki tahun 2023, JFX maupun ICDX telah menyiapkan sejumlah program-program yang siap direalisasikan. JFX misalnya akan mengembangkan kontrak multilateral baru yaitu olein, CPO dan kopi. Selain itu mengembangkan produk pasar fisik kopra yang diharapkan menambah variasi produk pasar fisik di JFX. *"Kami juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan berkontribusi pada rencana pengembangan JFX dan dapat melayani member dan seluruh pemangku kepentingan dengan baik untuk pertumbuhan industri PBK,"* kata Stephanus.

Sementara itu *Board Member* ICDX, **Megain Widjaja**, mengungkapkan pihaknya merupakan yang pertama dalam meluncurkan produk komoditi Syariah sebagai inovasi perbankan syariah Indonesia. Pasar tersebut dinamakan Pasar Murabahah Komoditi Syariah. Hal ini menandai era baru perekonomian Indonesia di mana Bursa Komoditi untuk pertama kalinya bekerjasama langsung dengan Lembaga perbankan dalam memfasilitasi kebutuhan pasar.

"Sejak ditransaksikan pada April lalu hingga November 2022 total nilai transaksi komoditi syariah ICDX telah mencapai Rp 700 miliar," kata Megain dalam sebuah keterangan persnya.

Investor Aset Kripto Tembus 17 Juta Lebih

Pasar Aset Kripto terus bertumbuh, baik jumlah investornya maupun jenisnya yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan total investor kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang per April 2023. Jumlah tersebut bertambah 11.000 orang dibandingkan bulan sebelumnya atau meningkat 0,64 persen secara bulanan dari posisi akhir Maret 2023 sebanyak 17,14 juta orang. Sementara itu, jika dilihat secara tahunan, jumlah pelanggan terdaftar atau investor aset kripto telah bertambah sekitar 3,52 juta orang atau 25,64 persen dibandingkan posisi April 2022 sebanyak 13,73 juta orang.

Walaupun terus bertambah, namun grafik pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada April 2023, pertumbuhan jumlah investor kripto tercatat mencapai 7,52 persen atau yang tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Setelah itu, persentase penambahan jumlah investor secara bulanan terus menurun. Sejak Oktober 2022 hingga April 2023, penambahan jumlah investor kripto bahkan tercatat tidak pernah naik di atas 1 persen.

Gambaran ini juga sejalan dengan tren menurunnya nilai transaksi kripto di dalam negeri. Pada April 2023, nilai transaksi kripto di Indonesia tercatat sebesar Rp10,77 triliun. Nilai ini menurun 14,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp12,54 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi pada April 2022 yang sebesar Rp36,91 triliun, nilai transaksi kripto di dalam negeri juga merosot hingga 70,82 persen.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, menyebutkan kondisi ini terjadi karena pengaruh sentimen global. Adanya tren kenaikan suku bunga acuan di pasar keuangan konvensional di Amerika Serikat dan Uni Eropa juga turut memberikan kontribusi terhadap turunnya animo investor yang masuk ke pasar aset digital.

Salah satu contoh adalah harga *Bitcoin* yang menjadi aset kripto paling populer di dunia. Secara *month-to-date* (MTD) harga *Bitcoin* (BTC) mengalami penurunan sekitar USD1.439 (-5.03 persen) dari posisi awal bulan Mei di sekitar USD28.640. Pada Rabu (31/5) siang pukul 14.00 WIB, misalnya, *Bitcoin* diperdagangkan sekitar USD27.150 dan turun 2,44 persen dalam 24 jam terakhir.

Fyqieh Fachrur, *Trader* Eksternal Tokocrypto, melihat secara keseluruhan potensi pasar kripto masih dalam tren *bullish* untuk jangka pendek. Sentimen yang masih kuat mendorong pergerakan harga kripto adalah kesepakatan *debt ceiling* atau plafon utang pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tengah menjadi angin segar bagi investor dan pelaku industri kripto. Namun, masih ada kekhawatiran soal efek ke depannya. Selain ikut memicu pergerakan harga *Bitcoin* dan kripto lain, kesepakatan ini juga disebut membatalkan rencana pungutan pajak listrik penambang *Bitcoin* hingga 30 persen.

Plafon utang AS kali ini diprediksi akan menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan harga *Bitcoin* pada bulan Juni 2023. Menurut Fyqieh, jika AS meningkatkan

plafon utangnya, hal tersebut mungkin berdampak negatif pada pasar kripto karena pemerintah akan berusaha membangun saldo kas dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Fyqieh menjelaskan, penerbitan utang untuk meningkatkan pendapatan akan memiliki efek sebaliknya, di mana uang akan dialihkan dari kas dan aset berisiko ke obligasi pemerintah AS, terutama karena imbal hasil instrumen ini meningkat untuk mengimbangi peningkatan pasokan.

Analisis Teknikal Indikator teknis BTC melihat ada kemungkinan *Bitcoin* akan mengalami penurunan di harga USD25.000, namun dengan adanya pola pembalikan arah ada kemungkinan BTC akan berada pada harga USD30.000 di bulan Juni. *Bitcoin* mengalami *pullback* ke arah resisten *line*-nya di harga sekitar USD28.069 dan kembali mengalami koreksi setelahnya. Dengan adanya *pullback* ini berarti investor dan *trader* melakukan tes apakah bisa *breakout* dari resisten *line*-nya dan mengalami lanjutan *bullish*.

Untuk saat ini investor disarankan untuk bijak dan mengambil sikap tenang. Investor sebaiknya melakukan diversifikasi portofolio dengan menambahkan berbagai aset kripto. Ini dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan bahwa portofolio tidak terlalu bergantung pada satu jenis aset saja. "Pertimbangkan untuk mengambil pendekatan jangka panjang dalam investasi. Pasar kripto terkenal dengan volatilitasnya, jadi bersiaplah untuk menghadapi fluktuasi harga jangka pendek dan jangan terlalu terpengaruh oleh pergerakan harian," begitu saran Fyqieh.

Pasar Lelang Komoditas Terus Menggeliat di Daerah

Di tengah gegap gempitanya transaksi pasar berjangka komoditi untuk jenis aset kripto, aktivitas yang berlangsung pada komoditi lainnya terus berjalan. Di antaranya dilakukan di berbagai daerah dengan mengembangkan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Di Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat melaksanakan pasar lelang komoditi yang dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (22/6).

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Aceh, Marzuki, mengatakan pasar lelang berlangsung selama satu hari pada 22 Juni 2023 tersebut merupakan kegiatan pasar lelang yang ke-9 sejak dimulai pada tahun 2021. PLK yang dilakukan Disperindag Aceh, menurut Marzuki, selain peserta dari lokal juga diikuti sejumlah pembeli dari manca negara. Selain lelang secara langsung, penyelenggaraannya dilaksanakan secara *online* sehingga bisa diikuti oleh provinsi lain. "Pasar lelang komoditi ini biasanya dengan menjual berbagai macam komoditi tetapi kebanyakan adalah jenis komoditas kopi Arabica Gayo dan Coklat," jelas Marzuki.



Foto: Disperindag Jambi

Sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bappebti, Marzuki menjelaskan bahwa peserta lelang baik penjual atau pembeli harus mendaftar secara *online* untuk dapat ikut serta dalam proses lelang. "Diharapkan kepada para konsumen kopi dapat menikmati kemudahan pembelian dengan ikut serta dalam proses yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ini," ujar Marzuki.

Kegiatan Pasar Lelang Komoditas juga dilaksanakan oleh Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun kegiatan yang dilakukan oleh NTB bukan dalam bentuk lelang komoditi, melainkan membahas Teknis Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi yang diadakan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di Aston Hotel, Kamis (16/3).

Kepala Dinas Perdagangan Prov. NTB bersama Kepala Bidang PPDN menghadiri sekaligus membuka acara ini. Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang yang terdiri dari OPD terkait Kab/Kota se-NTB serta para pelaku usaha dan bertujuan untuk mempertemukan kepentingan produsen, UKM, dengan pemakai langsung, pabrikan maupun pedagang besar. Diharapkan melalui pertemuan ini akan dicapai pemahaman tentang efisiensi mata rantai perdagangan, pembentukan harga yang transparan, terbentuknya referensi harga yang muaranya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas di NTB sendiri pada tahun 2023 rencananya akan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan rata komoditi yang ditawarkan seperti daging, mente, kopra, rumput laut, Lada, beras, kopi, bawang, jagung, dan kemiri.

Tentang pelaksanaan PLK di Nusa Tenggara Barat ada sebuah studi yang dilakukan oleh Vicky Tribuana (NPP. 29.1276 Asdaf Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Studi Keuangan Publik) yang dilakukan tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Pasar

Lelang Komoditas Dalam Upaya Peningkatan Daya Jual Kelompok Tani Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat". Dalam kesimpulan studinya dijelaskan bahwa Disdag Provinsi NTB dikatakan kurang maksimal dalam pelaksanaan PLK. Hal itu berdasarkan salah satu kasus gagal serah atau gagal bayar yang terjadi yaitu pada pelaksanaan pasar lelang komoditas ke 1 (satu), yaitu transaksi daging ayam *frozen* yang bernilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengusaha dari Kalimantan. Disebutkan bahwa terjadi gagal serah atau gagal bayar pada transaksi lelang yang dilakukan dan belum dapat diselesaikan oleh Disdag Provinsi NTB.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dijelaskan bahwa kesalahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pihak Disdag Provinsi NTB. Hal itu dikarenakan dari pihak *seller* dan *buyer* pada saat akan serah terima barang lebih sering bermain empat mata dan tidak ingin melibatkan pihak dari Disdag Provinsi NTB itu sendiri. Ada pula penyebab lain yaitu ketidaksiapan kelompok tani, perbedaan kualitas produk, perbedaan harga produk dan tidak adanya hukuman yang mengikat *seller* dan *buyer*. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi yang dapat mengatasi permasalahan gagal serah atau gagal bayar tersebut. Dalam hal ini Vicky Tribuana memberikan solusi berupa pengadaan bank modal, yakni pihak perbankan yang dapat ditunjuk oleh Disdag Provinsi NTB sebagai penjamin dari penyelenggaraan PLK. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara setiap kelompok tani atau pengusaha yang ingin mengikuti PLK harus memberikan jaminan berupa uang yang disimpan oleh bank modal sebagai jaminan apabila ada salah satu di antara *seller* atau *buyer* melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian pihak yang dirugikan akibat gagal serah atau gagal bayar tidak sepenuhnya mengalami kerugian.

Temu Teknis SRG Yogyakarta dan Jawa Tengah



Bappebti menyelenggarakan Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) di Yogyakarta, Rabu (21/6). Kegiatan diikuti oleh para pengelola gudang dan pejabat pada dinas yang telah mengimplementasikan SRG di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, Heryono Hadi Prasetyo, berharap agar Pengelola Gudang SRG dapat mengoptimalkan perannya, tidak hanya sebagai penjaga/pemelihara komoditi dalam gudang semata, namun juga mampu untuk meningkatkan fungsi gudang SRG sebagai sentra logistik untuk pemasaran komoditi bagi pasar lokal dan luar negeri.

Seluruh peserta sepakat dan berkomitmen untuk mendukung optimalisasi dan akselerasi implementasi SRG di daerahnya masing-masing dan akan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bappebti, Kementerian/Lembaga dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait lainnya.



Foto: Bagian KIP



• Petani Kabupaten Kebumen Ikuti Sosialisasi Sistem Resi Gudang

Para petani di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang diselenggarakan oleh Bappebti bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, Selasa (20/06). Selain petani, mereka yang hadir adalah pelaku usaha komoditi di sekitar lokasi Gudang SRG Kabupaten Kebumen dan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga Seknas BUMP.

Dari Bappebti sendiri yang menjadi narasumber Ahli Muda Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Dharmawan Prakarso, yang memberikan gambaran kepada peserta mengenai peluang apa saja yang dapat mereka manfaatkan dengan keberadaan gudang SRG.



Foto: Bagian KIP

• Akses Ekspor Komoditi Dari Wilayah Selatan Sulawesi

Bappebti menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha dan Lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) dengan Tema “Prosedur dan Akses Ekspor Komoditas SRG”, Senin (12/6) dan berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Bulan Literasi SRG & PLK 2023. Diharapkan melalui kegiatan ini peserta pelatihan mendapatkan informasi terkait prosedur ekspor serta pasar ekspor komoditi dari wilayah Sulawesi Selatan.

Kegiatan pelatihan menghadirkan narasumber dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kemendag serta Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara para hadirin dari Dinas Perdagangan serta Pengelola Gudang di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara.

Foto: Bagian KIP



Foto: Bagian KIP

• Focus Discussion Group Bahas Transformasi Gudang SRG

Bappebti Kementerian Perdagangan menggandeng PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/6). Diskusi ini mengusung tema “Transformasi Gudang SRG: Meningkatkan Efisiensi dan Akses Pasar.

Sekretaris Bappebti Oly Andrianita yang membuka acara menyampaikan bahwa Bappebti terus konsisten mengupayakan Sistem Resi Gudang (SRG) dapat lebih berkembang.

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo; serta Kepala Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Sugih Rahmansyah; Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey; Direktur Utama PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) Yose Skundarisa; dan *Senior Vice President* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sunu Widi Purwoko. Diskusi dipandu oleh Kepala Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK, Widiastuti.

• Sosialisasi Implementasi SRG di Banten

Bappebti dan Dinas Perindag Provinsi Banten gelar kegiatan sosialisasi implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan tema “Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Senin (19/6).

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, Heryono Hadi Prasetyo, yang memaparkan peran SRG dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui beberapa manfaat yang diperoleh melalui implementasi SRG secara optimal dan berkesinambungan, di antaranya sebagai alternatif untuk mendapatkan permodalan, manajemen pascapanen dan efisiensi rantai pasok.

Acara diikuti oleh 11 pelaku usaha dan 5 Pemerintah Kabupaten yang telah memiliki Gudang SRG dan/atau berpotensi untuk mengimplementasikan SRG di wilayah Provinsi Banten. Peserta yang hadir pada pertemuan ini cukup antusias dan beberapa di antaranya tertarik untuk mengimplementasikan SRG, antara lain: PT Agrobisnis Banten Mandiri (BUMD Provinsi Banten) dan salah satu pelaku usaha (Koperasi) di Kabupaten Serang.



Foto: Bagian KIP



SRG Bukan Hanya Jamin Pasokan Komoditi Tapi Juga Berorientasi Ekspor



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus konsisten berupaya agar Sistem Resi Gudang (SRG) dapat berkembang. Jika pada mulanya SRG berfokus menjamin ketersediaan pasokan komoditi, khususnya bahan pangan dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir SRG terbukti mampu melakukan *rebranding* menjadi komoditi berorientasi ekspor ke pasar global. Selain masyarakat mudah mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, para pelaku usaha juga dapat menjual komoditinya ke pasar global dengan mekanisme penyimpanan komoditinya melalui SRG.

Penjelasan ini disampaikan Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita dalam pembukaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/6). Diskusi digelar Bappebti dengan menggandeng PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan mengusung tema "Transformasi Gudang SRG: Meningkatkan Efisiensi dan Akses Pasar".

FGD ini merupakan forum yang tepat karena dihadiri praktisi, pemangku kepentingan dibidang dalam negeri dan ekspor, serta pengawas. Dengan demikian, mampu dihasilkan hal-hal

positif yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan teknis terkait SRG. "Terkait kebijakan, saat ini, Bappebti tengah memproses harmonisasi untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait SRG. Dalam Peraturan Menteri yang berlaku saat ini, terdapat 20 komoditi yang tercakup, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam beku karkas, gula kristal putih, dan kedelai. Nantinya, akan ditambahkan tembakau dan kayu manis sehingga menjadi total 22 komoditas yang diregulasi Bappebti," imbuh Olvy.

Olvy mengungkapkan pemanfaatan SRG sebagai mekanisme pembiayaan berbasis komoditi dapat mendukung kegiatan eksportir komoditi yang telah dapat diresigudangkan. Saat ini, telah muncul pengelola gudang dan pelaku SRG yang merupakan pelaku ekspor atau eksportir untuk beberapa komoditi, seperti kopi, rumput laut, beras organik, ikan, dan timah. Komoditi yang disimpan dapat dijadikan pembiayaan sehingga aktivitas perusahaan dapat tetap berjalan.

Contoh ekspor komoditi dengan memanfaatkan SRG, misalnya terjadi pada pembukaan Bulan Literasi SRG di mana Wamendag Jerry Sambuaga melepas ekspor 19,2 ton kopi robusta

dari gudang SRG Kabupaten Subang ke Mesir dan Libanon, serta melepas ekspor 9.5 ton kakap Angkoli dari gudang SRG Kabupaten Probolinggo ke Australia. Kisah sukses ekspor komoditi dari gudang SRG juga terjadi di beberapa daerah, yaitu Aceh (kopi), Jawa Timur (ikan dan rumput laut), Jawa Tengah (beras dan timah), Jawa Barat (kopi), Sulawesi Selatan (ikan dan rumput laut), Sumatera Barat (gambir), dan Kepulauan Bangka (timah).

Bursa Kripto Akan Bikin Transaksi Aset Kripto Lebih Aman

Para investor sedang menunggu pembentukan bursa kripto yang dijanjikan pemerintah bisa terealisasi paling lama Juli 2023. Bursa kripto ini diyakini menjadi salah satu cara mencegah terjadinya penipuan investasi. "Melalui Bursa Kripto ini nanti ada uang kustodian, yang akan lebih membuat transaksi aset kripto jadi lebih aman," kata *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Nailul Huda, seperti dikutip *Tirto.id*, di Jakarta, Rabu (21/6).

Nailul mengatakan, potensi akses investasi kripto cukup besar di Indonesia. Fenomena tersebut harus dibentengi dengan perlindungan yang kuat dan diiringi dengan literasi yang mumpuni. "Kita seringkali melihat ada penipuan-penipuan, termasuk penipuan di investasi aset kripto. Makanya, kita sebenarnya butuh instrumen yang dapat melindungi investor," katanya.



Ke depan, dia berharap kasus seperti *Binance* yang membawa kabur uang kustodian bisa diberantas, sehingga bisa tercipta ekosistem investasi yang sehat. "Kasus binance itu kan uangnya dibawa kabur oleh pemilik perusahaan, makanya dengan adanya bursa kripto ini kita menciptakan ekosistem sebenarnya, dan ekosistem ini yang relatif bisa melindungi investor," jelas Nailul.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih menggodok pembentukan bursa kripto di Indonesia yang diperkirakan bisa meluncur paling lambat Juli 2023. Saat ini progresnya telah mencapai 75 persen. "Bursa kripto progres masih on track dengan target Juni dan paling telat awal Juli sudah bisa launching," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti Tirta Karma Senjaya.

Tirta mengatakan, salah satu hal yang paling penting dari peluncuran bursa kripto adalah permodalan yang sudah memadai. "Kami juga sedang proses untuk lembaga kliring dan depository atau kustodiannya supaya bisa seiring operasionalnya," tambah Tirta.



Minyak Dunia Terus Terkoreksi Menunggu Tanda Ekonomi Global Lebih Baik

Harga minyak turun pada akhir perdagangan hari Senin (19/6) atau Selasa pagi WIB, karena pengaruh ekonomi China yang terus melakukan penurunan permintaan. Minyak mentah berjangka *Brent* untuk pengiriman Agustus terkoreksi 48 sen atau 0,6 persen, menjadi ditutup di USD76,13/barel di London ICE Futures Exchange. Sementara minyak mentah *West Texas Intermediate* (WTI) AS turun 49 sen atau 0,7 persen, menjadi USD71,29/barel pada pukul 19.35 GMT.

Sejumlah bank besar telah memangkas perkiraan mereka untuk pertumbuhan produk domestik bruto China 2023 setelah data bulan Mei pekan lalu menunjukkan pemulihan pasca-Covid di negeri Panda itu dirasakan goyah. China diperkirakan akan memangkas suku bunga pinjaman untuk menopang pemulihan ekonominya. "Pasar minyak sedang mengamati tanda-tanda lebih lanjut, apakah ekonomi global akan meningkat," kata Jorge Leon, wakil presiden senior *Rystad Energy*.

Menurut Leon, sebagaimana dikutip *Reuters*, banyak yang akan bergantung pada kinerja ekonomi China pada paruh kedua tahun ini. Selain itu juga karena pengaruh efektivitas langkah-langkah stimulus yang dilakukan baru-baru ini, serta pada kemampuan AS dan Eropa untuk menghindari perlambatan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga.

Di sisi lain meningkatnya ekspor minyak Iran juga membebani harga. Ekspor minyak mentah dan produksi minyak Iran telah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 meskipun ada sanksi AS. Sementara itu Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia bulan ini menyetujui kesepakatan produksi minyak baru. Begitu juga dengan Arab Saudi yang berjanji akan memangkas produksi minyaknya pada Juli. "Sentimen di pasar minyak mentah, pedagang cukup bearish," kata *Daniel Ghali*, ahli strategi komoditas di *TD Bank*. "Tapi dari perspektif yang lebih luas, komunitas analis masih mencari defisit yang cukup signifikan dalam beberapa bulan mendatang."

Bitcoin Terdorong Naik Setelah Dua Bulan 'Diam di Tempat'



Aset kripto *Bitcoin* (BTC) tembus USD30 ribu pada Kamis (22/6) karena terdorong oleh sentimen dari *BlackRock* yang mengajukan ETF BTC *Spot*. Tercatat *Bitcoin* melonjak 5,78% dalam 24 jam terakhir hingga bertengger di level USD30.454,26. Terakhir kali, BTC berhasil menembus ambang batas USD30 ribu pada April lalu.

Seperti dikutip *CoinDesk*, setelah berminggu-minggu suram, *Bitcoin* melonjak untuk hari kedua berturut-turut karena investor mendapatkan kepercayaan dari aplikasi ETF BTC *spot* oleh *BlackRock* dan perusahaan manajemen aset besar lainnya.

Bitcoin mulai naik pada Selasa (20/6) setelah liburan akhir pekan yang panjang di AS, karena pasar sepenuhnya mencerna dampak dari pengajuan *BlackRock*. Kemudian pada hari itu, pengajuan ulang *bitcoin spot* oleh *Invesco* dan *WisdomTree* semakin mencerahkan suasana, menawarkan bukti terbaru tentang minat investor institusional yang tumbuh di pasar kripto. "Ada gelombang optimisme di pasar kripto sekarang karena pemain institusional besar turut ambil bagian dalam industri secara besar-besaran," Nihar Neelakanti, CEO dan salah satu pendiri koleksi digital yang didukung karbon *Ecosapiens*.

Neelakanti juga mencatat 'rumor' bahwa *Fidelity* mungkin juga berlaku untuk ETF. Namun, juru bicara *Fidelity* mengaku belum secara terbuka mengumumkan rencana pengajuannya. *Invesco*, yang mengelola aset senilai USD1,4 triliun, mengajukan aplikasinya bersama dengan manajer aset digital *Galaxy Digital*.

Tidak hanya *Bitcoin*, *Ethereum* (ETH) juga mengalami kenaikan. Aset kripto terbesar kedua ini melesat hingga di atas USD1.900 untuk pertama kalinya dalam tiga minggu.

Emas Dunia Berada di Level Terendah Pada Tiga Bulan Terakhir

Harga emas dunia terpantau terus menurun pada perdagangan Kamis (22/6). Ini merupakan level terendah dalam tiga bulan menyusul pernyataan dari Ketua *Federal Reserve* AS, Jerome Powell, bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan terjadi. Pada perdagangan pukul 15.00 WIB, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus 2023 di divisi *Comex New York Exchange*, terkoreksi 0,22% menjadi USD1.939,80 per *troy ounce*.

Sementara itu, di pasar *spot*, harga emas juga melemah 0,22% ke level USD1.929,59 per *troy ounce*. Adapun indeks dolar AS, turun 0,04% menjadi 101,648.

Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat Antam ukuran 1 gram dijual Rp1.058.000, naik Rp1.000 per gram dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga *buyback* emas Antam berada di level Rp940.000 per gram, lebih tinggi Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Harga emas milik Antam

0,5 gram	: Rp 578.500
1 gram	: Rp 1.057.000
2 gram	: Rp 2.054.000
3 gram	: Rp 3.056.000
5 gram	: Rp 5.060.000
10 gram	: Rp 10.065.000
25 gram	: Rp 25.037.000
50 gram	: Rp 49.995.000
100 gram	: Rp 99.912.000
250 gram	: Rp 249.515.000
500 gram	: Rp 498.820.000
1000 gram	: Rp 997.600.000

Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka Komoditi Dengan Kode HS 15111000

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan, Farid Amir, menyatakan ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur CPO dengan kode HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya. Hal ini dipilih karena CPO tersebut volumenya tidak terlalu besar, sehingga saat implementasi tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar pula. "Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Ekportir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," jelas Farid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/6).

Dijelaskan pula bahwa alur proses dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka tidak ada perubahan yang signifikan. Namun ada penambahan satu proses sebelum eksportir melakukan ekspor CPO yaitu harus ditransaksikan di bursa berjangka, untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa. Bukti pembelian tersebut adalah dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE).

Sementara itu Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan tentang Rancangan Peraturan Bappebti



tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka. "Dalam prosesnya, kebijakan dan ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sinergis sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus selaras dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha," jelas Olvy.

Ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data CPO yang akurat serta sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 32/1997 sebagaimana diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), yang menyatakan bahwa salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana penciptaan harga (*price discovery*) dan pembentukan harga acuan (*price reference*) yang transparan.

Selain itu biaya transaksi CPO di dalam bursa berjangka juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Nilai Resi Gudang Komoditi Ikan Melonjak 10 Kali Lipat

Ikan termasuk komoditi yang belum lama masuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Walau begitu komoditi ikan menunjukkan dominasinya sejak awal tahun hingga Mei tahun 2023. PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai pusat registrasi resi gudang baru-baru ini merilis data pemanfaatan resi gudang selama lima bulan pertama tahun 2023. Dalam laporannya, registrasi resi gudang sejak Januari-Mei 2023 mencapai 138 registrasi terdiri dari 9 komoditi, 36 resi (26 persen) di antaranya adalah komoditi ikan. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yakni hanya sebanyak 3 resi gudang.

Dari sisi volume, resi gudang ikan juga mengalami peningkatan dari 90 ton pada periode Januari-Mei 2022 menjadi 303 ton pada periode yang sama tahun 2023. Peningkatan juga terjadi dari sisi nilai pembiayaan, yakni dari Rp1,5 miliar pada Januari-Mei 2022 menjadi Rp 15,8 miliar dalam kurun waktu yang sama di tahun 2023. Artinya nilai resi gudang ikan melonjak 10 kali lipat.

Plt. Direktur Utama KBI, Budi Susanto, mengatakan peningkatan pemanfaatan resi gudang oleh para nelayan dan pemilik komoditi ikan ini menjadi hal positif dalam ekosistem SRG. "Dengan memanfaatkan resi gudang, nelayan dan para pemilik komoditi ikan dapat menjaga stabilitas harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri," ujar Budi Susanto dalam siaran pers, Rabu (14/6).

Limited Oil Supply in the US Triggers an Increase Oil Prices

World oil prices were slightly higher in early Asian trading on Wednesday morning (28/6). The gains came as markets worried about supply constraints in the United States after data showed larger-than-expected crude and gasoline draws. The US is the world's largest oil consumer.

Brent crude futures rose 32 cents, or 0.4 percent, to trade at USD72.58 per barrel at 00.02 GMT. West Texas Intermediate (WTI) crude oil futures rose 23 cents or 0.3 percent to trade at USD67.94 per barrel. Both contracts had fallen about 2.5 percent in the previous session on signals that major central banks may not be done with interest rate hikes.

Citing data from the American Petroleum Institute (API) industry group, crude oil stocks fell by around 2.4 million barrels in the week ending June 23, 2023. Meanwhile, analysts estimated stocks would be 1.76 million barrels.

Ringgit Strengthens, CPO Prices Weaken

The price of crude palm oil (CPO) closed lower at the end of trading Tuesday (27/6) on the Malaysian futures exchange. This weakening price was weighed down by higher Ringgit strength. However, rising substitute oil prices limited deeper losses.

It was recorded that CPO futures prices in Malaysia for the July 2023 contract closed down 54 points or 1.44% from the previous RM3,739/ton to RM3,685/ton. For the August 2023 contract, CPO futures prices in Malaysia fell 46 points or 1.23% from RM3,729/ton to RM3,683/ton. Meanwhile, CPO futures prices for the September 2023 contract fell 44 points or 1.18% from RM3,719/ton to RM3,675/ton.

Gasoline inventories fell by about 2.9 million barrels, compared with an expected draw of 126,000 barrels. It comes after clashes between Moscow and the Russian Wagner mercenary group raised concerns about possible oil supply disruptions and as markets await Saudi Arabia's promised oil output cut from July.

On the demand side, European Central Bank President Christine Lagarde said on Tuesday (27/6) that very high inflation would require the bank to avoid announcing a halt to interest rate increases. Higher interest rates could weigh on economic activity and oil demand. The rise in US consumer confidence in June also worried markets that the Federal Reserve may have to continue raising interest rates.



Ringgit exchange rate, which is the palm oil trading currency, strengthened 0.17% at the start of trading. A stronger Ringgit makes palm oil less attractive to foreign currency holders. Meanwhile, soybean prices on the Chicago Board of Trade (CBOT) rose 0.03%. The Dalian Commodity Exchange's most active soybean contract rose 0.65% and the palm oil contract rose 1.38%.

Palm oil prices are influenced by price movements of related oils as they compete for a share of the global vegetable oil market.

Bitcoin Rises Highest in the Last Two Weeks

The largest crypto asset in the world, Bitcoin, had reached the price of USD31,000 or the equivalent of IDR 464.8 million (assuming an exchange rate of IDR14,994 per US dollar). This price increase is the highest for Bitcoin since June 8, 2022.

Even though the current Bitcoin price is still less than its all-time high, which was in November 2021 at a price of around USD68,000 or the equivalent of IDR1 billion, Bitcoin price has managed to penetrate USD31,000. This is the first time after a series of events that rocked the industry since 2022.

Then, what causes Bitcoin price increase? Reporting from Investopedia, Monday (26/6), Bitcoin's recent rise was driven by asset management giant BlackRock (BLK) submitting an application for funds traded on spot bitcoin exchanges last week.

Coal Soars Hard Spurred by China's Plan to Provide Economic Stimulus

The coal price for the July contract on the ICE Newcastle market on Thursday (22/6) closed at USD141 per ton. This price jumped 5.5% and became the highest level since June 9th or in the last nine trading days.

The increase occurred in response to the Chinese government's plan to provide economic stimulus by cutting bank interest rates. Coal prices were also helped by statements by China's Deputy Prime Minister, He Lifeng, who stated that there were signs of improvement in China's economy. This statement was made when Lifeng met with Temasek Chairman, Lim Boon Heng, Wednesday (21/6). Lifeng said that the service industry and manufacturing sector had moved in a positive direction.

The Chinese government is currently finalizing plans to provide a stimulus package to spur its economic

recovery with funds estimated at 1 trillion Yuan or around USD140 billion. China's economy is in the world spotlight because it continues to show weakness. China's economic data shows that the manufacturing sector is experiencing a deep contraction. Likewise, imports fell. Meanwhile, growth in retail sales and industrial production appeared to be lower than market expectations. Based on data from the National Bureau of Statistics (NBS), the manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) fell to a five-month low of 48.8, down from 49.2 in April 2023.

The increase in coal prices was also supported by rising temperatures in Europe. The increase in temperature is expected to also demand for electricity and coal. Developments in China and Europe this time were able to reduce negative sentiment that previously haunted coal prices.



ICC Promosi dan Koordinasi Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa

Kelapa merupakan komoditi yang sudah sangat populer di seluruh belahan dunia. Pemanfaatannya juga sangat luas, tidak hanya untuk kebutuhan bahan pangan, tapi juga untuk berbagai jenis bahan baku industri termasuk untuk keperluan energi.

Di dunia luas perkebunan kelapa diperkirakan mencapai 12 juta hektar, sementara di Indonesia menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) luasnya 3,34 juta hektar. Perkebunan kelapa paling luas ada di Pulau Sumatera sebanyak 1,05 juta hektar. Negara-negara penghasil kelapa dunia bernaung di dalam asosiasi yang disebut *International Coconut Community* (ICC) yang saat ini anggotanya sebanyak 20 negara, termasuk Indonesia.

Kelapa melibatkan jutaan petani, juga kehidupan para pedagang dan industri yang mengolah komoditi ini menjadi berbagai produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dunia. Untuk mengetahui lebih dalam tentang komoditi kelapa, berikut ini wawancara khusus **Buletin Bappebti** dengan **Alit Pirmansah**, *Market & Statistic Officer ICC* di kantor ICC di Gedung Bappebti lantai 8, Jakarta:

Alit Pirmansah
Market & Statistic
Officer ICC



Buletin Bappebti

Sejak kapan ICC berdiri dan kenapa kantornya ada di Jakarta?

Alit Pirmansah

Kantor ICC ada di Indonesia. Karena *national liaison*-nya adalah Kemendag, maka Kemendag lah yang memfasilitasi. Kita berdiri sejak 1969 waktu itu masih bernama *Asian Coconut Community*. Tahun 1975 karena *Papua New Guinea* (PNG) masuk, namanya menjadi *Asian and Pacific Coconut Community*. Kemudian 2018 namanya menjadi ICC seperti sekarang ini, karena anggotanya sudah dari seluruh dunia, tidak hanya Asia, Amerika Selatan tapi juga Afrika, Karibia. Seluruh anggota ICC sekarang 20 negara.

Buletin Bappebti

Di mana posisi Indonesia di antara negara-negara anggota ICC itu?

Alit Pirmansah

Indonesia adalah negara penghasil kelapa terbesar kedua di dunia, setelah Filipina. Sebelumnya Indonesia nomor 1, tetapi karena Filipina luas lahannya terus bertambah (walaupun pertambahannya relatif sedikit) sementara di pihak lain kebun kelapa di Indonesia luas lahannya terus menurun, menjadikan Indonesia sebagai nomor 2 dunia.

Buletin Bappebti

Kenapa luas lahan perkebunan kelapa di Indonesia itu turun?

Alit Pirmansah

Karena perubahan peruntukan lahan. Misalnya, yang tadinya kebun kelapa berubah menjadi lahan sawit, atau berubah jadi area perumahan. Penyebab lain adalah tanaman yang rusak akibat serangan hama dan penyakit, tumbang dan kena petir tidak diganti dengan yang baru. Dari segi produktivitas juga menurun. Rata-rata produktivitas kelapa dari Indonesia sekitar 40 butir/pohon/tahun, masih

jauh dari produktivitas kelapa unggul yang sudah dilepas secara resmi oleh Menteri Pertanian yang bisa mencapai lebih dari 80 butir/pohon/tahun. Produksi tertinggi kelapa dalam dicapai mulai pada umur pohon 20 tahun sampai 40 tahun, sedangkan kelapa genjah puncak produksinya pada umur 15 tahun sampai 35 tahun. Walaupun kelapa dalam bisa berproduksi hingga 60 tahun keatas, namun produksinya akan menurun seiring pertambahan umur, demikian pula dengan kelapa genjah, setelah 35 tahun, produksinya akan menurun.

Jadi harus ada peremajaan. Sebenarnya Indonesia memiliki berbagai jenis pohon kelapa unggul dan sudah bersertifikasi. Ada lebih dari 20 jenis kelapa unggul, dan sekitar 100 aksesori kelapa yang telah dikarakterisasi.

Buletin Bappebti

Dari segi agenda kerja, apa target yang ingin dicapai ICC?

Alit Pirmansah

ICC ini kan agenda kerjanya adalah bekerjasama dengan negara anggota ICC untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan kegiatan sektor kelapa yang fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, serta mengoptimalkan semua potensi kelapa sebagai tanaman kehidupan dalam mendukung pencapaian sektor kelapa yang berkelanjutan dan tangguh. Banyak potensi yang sudah dimanfaatkan, namun banyak juga yang belum digali secara optimal. Oleh sebab itu ICC berperan dalam memberikan *advocacy* kebijakan kepada pemerintah, memfasilitasi peningkatan kapasitas petani dan semua yang terlibat melalui program pelatihan dan *workshop*, transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan, memfasilitasi pengembangan dan perluasan pasar produk kelapa, serta menyiapkan informasi dan publikasi yang dibutuhkan.

Kelapa itu sangat berbeda dengan sawit. Di Indonesia sendiri, kelapa ini dimiliki oleh 99 persen petani, berbeda dengan sawit yang lebih banyak dimiliki perusahaan-perusahaan besar. Kalau pemerintah hendak berfokus pada rakyat kelapa selayaknya menjadi salah satu program prioritas nasional.

Sekarang ada 6 juta rumah tangga petani kelapa di Indonesia. Kalau misal satu rumah tangga ada 4 orang, maka ada 24 juta orang yang hidupnya bergantung ke kelapa. Belum lagi pihak lain yang terlibat seperti pedagang pengumpul, industri dan seterusnya. Jadi menurut kami sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan/*concern* kepada sektor kelapa.

ICC memperjuangkan hal itu, yakni memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa, khususnya dan umumnya, seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Tetapi 'kan kami hanya memformulasikan program, sementara pelaksanaannya kembali pada pemerintah masing-masing negara anggota. Jadi, eksekutornya adalah negara itu sendiri.

Buletin Bappebti

Apakah ada contoh negara yang concern dengan petani kelapanya?

Alit Pirmansah

Jadi begini. Suatu negara "pro" terhadap kelapa, salah satunya bisa terlihat dari sisi kelembagaannya. Misalnya, Filipina mempunyai *Philippine Coconut Authority* yang langsung berada di bawah presiden. Ini menunjukkan negara itu serius menangani komoditi kelapa dan petaninya. Kemudian, India memiliki *Coconut Development Board* berada di bawah kementerian pertanian. Selain itu India juga punya *Coir Board* (sabut) di bawah kementerian perindustrian. Jadi mereka serius.

Negara kecil yang luas kelapanya sedikit juga punya lembaga kelapa sendiri, seperti Jamaica (*Coconut Board*) dan PNG (Kokonas Industri Koporesen). Ini menunjukkan bahwa negara-negara itu serius menangani masalah kelapa. Mereka sangat fokus. Dan itu terbukti, seperti di India produktivitas dan cara mereka mengelola petani kelapa serius sekali

Foto: Bagian KIP



dan Mereka berhasil. Di samping itu, indikator lain yang sangat penting adalah tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa.

Buletin Bappebti

Dari sisi industrinya sendiri bagaimana?

Alit Pirmansah

Dari segi industri, yang dominan di pasar dunia adalah Filipina dan kedua, Indonesia karena luas dan volume perdagangannya. Ekspor kelapa India itu kecil di pasar dunia, tapi *market* domestiknya besar. Tidak mengherankan kalau harga kelapa di India selalu tinggi lebih tinggi dari harga kelapa di Filipina dan Indonesia, karena *market* di dalam negeri sendiri tinggi. Itu sebabnya ekspornya tidak besar. Mengenai harga kelapa dunia, seperti kita ketahui, yang menentukan harga saat ini bukan produsen tetapi konsumen yaitu di pembeli. Harga di konsumen ini kemudian direfleksikan ke harga di tingkat petani. Biasanya harga mengacu pada bursa komoditi di Rotterdam. Perbaikan *system* penentuan harga kelapa perlu dilakukan dengan mempertimbangkan secara komprehensif variabel-variabel penentu agar bisa menguntungkan semua pihak tanpa ada yang dirugikan.

Buletin Bappebti

Berapa harga kelapa saat ini?

Alit Pirmansah

Harga di tingkat industri berada pada kisaran Rp2.000 hingga Rp2.400 per buah kelapa bulat yang sudah tidak bersabut lagi. Kalau di tingkat petani paling sekitar setengahnya harganya. Biasanya pengerjaan pengupasan sabut kelapa dikerjakan oleh petani atau pedagang pengepul, sehingga sabutnya tertinggal di petani atau pengepul. Di daerah tertentu seperti Bali sebagai daerah wisata,



harga kelapa cukup tinggi yakni sekitar Rp. 5.000. Permintaan air kelapa muda di daerah wisata cukup tinggi sehingga pengembangan jenis kelapa di suatu daerah hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan.

Buletin Bappebti

Komoditi kelapa harga acuannya terjadi di Bursa Rotterdam. Mengapa begitu?

Alit Pirmansah

Sejak dulu memang tidak ada bursa khusus untuk kelapa. Di Rotterdam pun bukan bursa kelapa sebagaimana yang kita bayangkan. Itu hanya deal-deal antara pembeli dan penjual, tapi deal-deal mereka itu jadi acuan harga. Kita beberapa tahun terakhir berupaya ingin memindahkan itu tapi itu kan B-B (*business to business*). Tapi masih susah kita lakukan karena juga menyangkut volume perdagangan di mana *market* terbesar kelapa adalah Eropa sehingga merekalah yang lebih menentukan harganya. Gambarnya, di Eropa punya kartel pembeli, sementara pada pihak penjual tidak memiliki kartel, sehingga posisi negara-negara penjual jadi lemah. Kita terpecah-pecah dan diadu harganya, malah terjadi persaingan di antara penjual. Dengan demikian penjual tidak bisa menentukan harga.

Saat ini kita sedang berupaya bagaimana supaya pihak penjual bisa duduk bareng untuk menentukan harga dan mencoba menemukan pasar lain yang lebih besar daripada Eropa.

Buletin Bappebti

Produk kelapa paling banyak diserap oleh industri makanan ya?

Alit Pirmansah

Ya, paling besar industri makanan. Kelapa ini mempunyai produk turunan yang banyak sekali.



Minyak kelapa, bungkil untuk pakan ternak, kelapa parut kering, tepung kelapa, santan (sebagai santan dan *low fat* kelapa parut kering yang banyak diminati konsumen Eropa). Jadi tidak ada produk yang terbuang. Minyak kelapa yang diekspor biasanya diproses lanjut menjadi produk pangan dan yang terbesar adalah produk non-pangan seperti kosmetik dan farmasi.

Selain itu air kelapa yang bisa dibuat *nata de coco*, cuka. Dari batoknya jadi briket arang, jadi karbon aktif (dulu dipakai untuk obat sakit perut). Sabutnya untuk media tanam, *dashboard* dan jok mobil, termasuk untuk bahan papan setelah melalui proses pengepresan. Untuk sabut saja setidaknya ada 15 produk turunan yang sudah dilakukan oleh India.

Buletin Bappebti

Dilihat dari multiplier effect dan juga manfaatnya, komoditi kelapa ini tampaknya lebih besar ketimbang sawit. Bagi ICC sendiri apa yang akan dilakukan ke depan?

Alit Pirmansah

Kata kuncinya adalah promosi dan sosialisasi. Kita ingin promosikan minyak kelapa itu sehat. Kandungan kolesterol itu tidak ada dalam minyak kelapa. Kolesterol itu hanya dari produk hewani. Maka, ketika anda makan rendang, yang kolesterol itu dagingnya, sedangkan santannya sendiri tidak mengandung kolesterol. Jadi minyak kelapa itu sehat. Kita akan menggandeng ikatan dokter-IDI, badan kesehatan dunia-WHO dan yang lainnya untuk mempromosikan minyak kelapa adalah produk sehat. Promosi dan sosialisasi ini juga akan kami targetkan kepada kaum milenial, generasi yang ketika mereka kecil dulu tidak suka minyak yang ada aroma kelapanya.

Kayu Manis Yang Selalu Dicari dan Sebentar Lagi Jadi Komoditi SRG



Kayu manis (*cinnamon*), kita mengenalnya dijual dalam bentuk potongan-potongan kecil di pasar dan biasa digunakan dalam memasak berbagai makanan. Selain itu kayu manis juga diproduksi dalam bentuk bubuk. Komoditi kayu manis ini merupakan salah satu komoditi yang populer dan tanamannya banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia.

Kayu manis bisa ditanam dari ketinggian 500 meter hingga 2.000 meter dari permukaan laut. Sebaran penanamannya di banyak provinsi, utamanya di daerah Jambi dan Sumatera Barat. Selain itu Boyolali, Yogyakarta dan Kalimantan Selatan juga menghasilkan banyak kayu manis ini.

Indonesia dikenal sebagai negara utama penghasil kayu manis. Komoditi ini selalu dicari dan diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Kanada. Kayu manis tergolong komoditi yang memiliki harga jual yang tinggi. Biasanya komoditi yang tergolong rempah-rempah ini digunakan sebagai bahan bumbu masakan, penganan kue/berbagai makan, minuman dan juga obat-obatan.

Harga kayu manis *stick* untuk grade A berada pada kisaran Rp40.000 per kg, *grade B* Rp35.000 dan *grade C* sekitar Rp30.000 per kg. Sementara harga kayu manis bubuk Rp70.000 per kg. Di pasar internasional harga

kayu manis mencapai USD13 atau sekitar Rp190 ribu per kg. Walaupun bukan komoditas unggulan secara nasional, tidak sedikit masyarakat yang berkebudaya kayu manis merasakan manfaatnya. Dari pengalaman, banyak masyarakat yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dari hasil berkebudaya kayu manis. Oleh sebab itu, diperlukan gerakan daerah untuk tetap memperhatikan produktivitas kulit kayu manis ini, karena akan selalu dibutuhkan baik tingkat nasional maupun ekspor.

Produksi secara keseluruhan berdasarkan data Kementerian Pertanian paling tinggi tahun 2016 mencapai 80.335 ton. Namun kemudian menurun sampai 48 ribu ton pada tahun 2020. Namun demikian, sejak tiga tahun terakhir produksinya kembali meningkat menjadi 60 ribu ton. Sementara nilai ekspor kayu manis senilai USD151,292 juta (tahun 2020) dan menunjukkan tren yang semakin meningkat.

Selain untuk makanan, kayu manis memiliki sejumlah manfaat dari segi kesehatan di antaranya mengontrol gula darah karena mengandung antioksidan, anti infeksi, meningkatkan fungsi otak, mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah pertumbuhan sel kanker, menghangatkan tubuh, dan mencegah penggumpalan darah.

Sebagai salah satu komoditi ekspor, pemerintah melalui Bappebti, Kementerian Perdagangan, berencana akan memasukkan kayu manis menjadi komoditi SRG (Sistem Resi Gudang). Melalui SRG petani kayu manis akan memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan komoditi kayu manis yang dihasilkan, dan di sisi lain SRG juga akan mendorong ekspor kayu manis menjadi lebih baik lagi.



Jangan Tergoda Cerita Orang, Pelajari dan Cermati Perilaku Forex

Judul Buku / **Buku Sakti Forex Trading**
 Penulis / Ratna Dewi Pudiastuti dan Yohana Oryzia Pratiwi
 Penerbit / Anak Hebat Indonesia, 2022, 200 halaman

Kita sudah sering kali mendengar istilah *Forex Trading*. Banyak orang yang tertarik dengan bisnis yang satu ini karena kabarnya bisa menghasilkan uang tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Penulis buku ini melihat dewasa ini perkembangan *trading* valas kian marak. Apalagi aplikasi *Forex Trading* saat ini tersedia dan mudah di-*download*, serta gampang dioperasikan melalui HP sehingga makin mudah buat calon investor untuk mengaksesnya. *Forex trading* dinilai sebagai sebuah peluang bagus untuk dicoba.

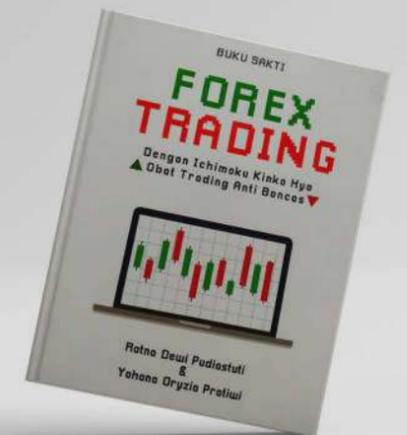
Masalahnya, pengetahuan para *trader* pemula tentang *Forex* masih sangat kurang sehingga banyak di antara mereka yang berguguran di tengah jalan. *Forex trading* memang menjanjikan keuntungan besar, tapi risikonya juga tinggi. Karenanya bisnis ini dikategorikan sebagai bisnis yang "*high risk, high return*". Kepada para pemula sebaiknya mempelajari *forex* atau bisnis valas ini secara seksama, agar siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan jika terjun ke bisnis ini.

Forex adalah singkatan *Foreign Exchange*, yaitu kegiatan jual-beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar *forex* merupakan pasar keuangan terbesar dan paling likuid dengan volume perdagangan mencapai USD4 triliun. Berbeda dengan saham, *forex* diperdagangkan interbank, *over the counter* (OTC), yang artinya tidak ada satu bursa yang mendominasi perdagangan. Yang menarik, pasar *forex* berlangsung selama 24 jam antara individu dengan broker *forex*, antara broker dengan bank, dan bank dengan bank lainnya. Jika sesi Asia ditutup, di Eropa baru dimulai dan dilanjutkan dengan sesi Amerika sehingga sesi perdagangan berjalan terus tanpa terputus.

Konsep dasar *Forex* adalah beli saat harga rendah dan jual pada harga tinggi. Perdagangan *forex* ini sangat menarik karena nilai suatu mata uang selalu berubah karena pengaruh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, suku bunga bank sentral, bahkan konflik antar negara bisa mempengaruhi valas ini. Maka, terus mencermati informasi perkembangan dunia menjadi hal yang harus diikuti untuk bisa mengambil keputusan yang tepat.

Selain tentang *forex* buku ini juga membahas tentang pasar modal, pasar uang, pasar saham, strategi investasi, manajemen risiko, serta mempelajari konsep dasar *Ichimoku*, yaitu indikator analisis *trading* untuk memprediksi pergerakan harga valas.

Untuk terjun ke perdagangan *forex* ini disarankan untuk melakukan latihan terlebih dahulu dengan menggunakan akun demo sebelum benar-benar melakukan investasi. Satu tips sederhana dari penulis buku ini: *forex* merupakan metode analisis tren pasar. Jadi, jangan melawan tren.



Peraturan Terbaru Bappebti Izinkan 501 Jenis Aset Kripto Bisa Diperdagangkan



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) pada bulan Juni 2023 mengeluarkan peraturan terbaru mengenai aset kripto di Indonesia, yakni Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan baru ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan Aset Kripto serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto.

Berdasarkan peraturan yang ditandatangani tanggal 9 Juni 2023 ini, terdapat 501 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada Agustus 2022, aset kripto yang boleh diperdagangkan berjumlah 383 jenis aset kripto. Dengan demikian terdapat tambahan 118 jenis aset kripto, atau sekitar 30 persen pertambahannya.

Mengenai penambahan jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 PerBa Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto.

Usulan yang disampaikan wajib dikaji bersama terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan memenuhi ketentuan. Usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset

Kripto dalam daftar Aset Kripto yang telah dikaji oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto itu kemudian disampaikan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto kepada Bappebti dalam bentuk rekomendasi hasil kajian.

Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bappebti (Pasal 3 ayat 1).



Selengkapnya Peraturan Kepala Bappebti ini bisa diakses melalui:

https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2023_06_09_qu3lclrm_id.pdf

TIPS AMAN TRANSAKSI ASET KRIPTO

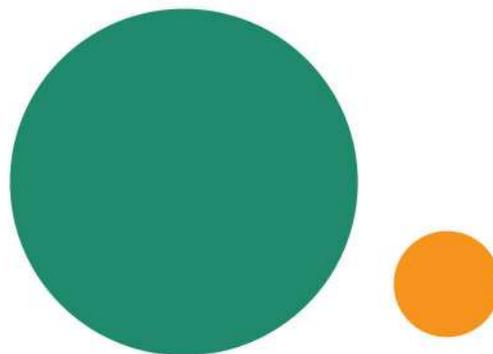
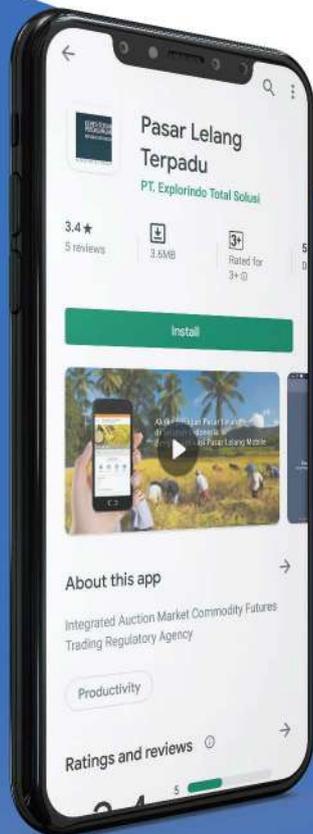


- 1 Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi Aset Kripto
- 2 Pelajari tata cara transaksi secara benar
- 3 Pastikan anda menginvestasikan dana anda untuk jenis Aset Kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti
- 4 Pelajari risiko – risiko yang dihadapi
- 5 Pastikan dana yang dipakai merupakan dana *idle* dan dari hasil yang legal

Pastikan Anda bertransaksi Aset Kripto pada perusahaan yang terdaftar pada BAPPEBTI

APLIKASI

Pasar Lelang Terpadu Google Play



Untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lelang, maka Bappebti telah membangun Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu** yang dapat diunduh melalui Google Play.

Melalui Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu**, maka penawaran lelang cukup dilakukan dengan menggunakan *smartphone* berbasis Android.

Download sekarang

